BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan negara di semua sektor terus mengalami kemajuan yang signifikan, dan pencapaian ini sangat tergantung pada sumber pendanaan dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi negara dan masyarakat karena bukan hanya membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, penerimaan pajak memiliki target yang harus dipenuhi, dan realisasi pajak menjadi indikator penting untuk mengevaluasi pencapaian tersebut. Namun, data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pada periode 2018 hingga 2020, realisasi pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ini mengindikasikan adanya situasi di mana pendapatan pajak lebih rendah dari yang diharapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikenal sebagai *shortfall*.

Penurunan kepatuhan wajib pajak dan hambatan dalam pemungutan pajak adalah faktor utama yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu hambatan utama dalam pemungutan pajak adalah *Tax Avoidance*, yang merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan. Menurut laporan *The State Of Tax Justice 2020*, penyalahgunaan pajak korporasi internasional dan penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi menyebabkan hilangnya nilai penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 6.520 triliun setiap tahunnya. Negara-negara dengan pendapatan tinggi cenderung menjadi korban utama kehilangan penerimaan pajak akibat *Tax Avoidance*. Namun, dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi *Tax Avoidance* menjadi sangat penting karena dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara, terlepas dari tingkat pendapatan mereka.

Menurut Dewi et al. (2016), penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia gagal mencapai target penerimaan pajak. Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak APBN Indonesia Tahun 2012-2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2013	878.685	873.874	99 %
2014	1.016.237	980.518	96 %
2015	1.148.365	1.077.307	94 %
2016	1.246.107	1.146.866	92 %
2017	1.489.255	1.240.419	83 %
2018	1.539.166	1.284.970	83 %
2019	1.472.710	1.343.530	91 %
2020	1.618.095	1.518.790	94 %
2021	1.786.379	1.546.141	87 %
2022	1.404.508	1.258.136	92 %

Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwasanya realisasi penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target, bahkan mengalami tren penurunan persentase penerimaan pajak.

Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak nasional selama periode Januari-September 2023 mencapai Rp1.387,7 triliun, atau sekitar 80,78% dari target tahun 2023 sebesar Rp1.718 triliun. Sementara itu, outlook penerimaan pajak untuk tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp1.818,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak selama Januari-September 2023 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,9% secara tahunan. Secara bulanan, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 1,6%.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks perpajakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perilaku ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap penerimaan negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana pendapatan

pajak memainkan peran vital dalam mendukung program pembangunan dan pembiayaan sektor publik.

Studi tentang *tax avoidance* menjadi semakin relevan di tengah kondisi di mana realisasi pajak nasional sering kali tidak mencapai target, seperti yang terlihat dalam data penerimaan pajak Indonesia pada Tabel 1.1. Meskipun pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara, adanya praktik *tax avoidance* dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang maksimal. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, serta dalam merancang kebijakan yang mampu menutup celah penghindaran pajak.

Dari Tabel 1.2, terlihat bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan pada industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak sektoral. Meskipun industri pengolahan memiliki kontribusi sekitar 27,3% terhadap penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaannya hanya mencapai 2,3% secara tahunan. Angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2022, yang mencapai 47,35%. Bahkan pada bulan September 2023, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan mengalami penurunan drastis sebesar 18,3%. Penurunan ini telah terjadi secara konsisten sejak bulan Juli 2023.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral

Sektor Usaha	Jan-Sept 2022 (%)	Jan-Sept 2023 (%)	Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	47.5	2.3	27.3
Perdagangan	67.8	4.8	24.0
Jasa Keuangan & Asuransi	15.3	25.1	12.0
Pertambangan	201.5	35.7	10.7
Transportasi dan Pergudangan	26.2	34.8	4.5
Konstruksi & Real Estate	6.2	13.5	4.2
Informasi & Komunikasi	17.7	10.6	3.5
Jasa Perusahaan	23.8	26.2	3.3
Jasa Kesehatan	14.5	22.4	2.8
Jasa Pendidikan	11.7	18.9	2.5
Pariwisata & Perhotelan	20.6	29.3	2.2

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Selain itu, terjadi juga perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor perdagangan. Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor perdagangan selama periode Januari-September 2023 hanya mencapai 4,8%. Angka ini menunjukkan penurunan dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 67,8% (yoy). Meskipun sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 24,0% terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, perlambatan pertumbuhan ini tetap menjadi perhatian.

Dilihat dari segi sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak pada September 2023 mengalami perlambatan di beberapa sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.2. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak di sektor usaha menunjukkan adanya gejolak ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi global saat ini

Sektor pertambangan juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dari 201,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi hanya 35,7% pada September 2023. Meskipun begitu, sektor pertambangan masih memberikan kontribusi sekitar 10,7% terhadap penerimaan pajak pada periode Januari-September 2023.

Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak, dengan pertumbuhan sebesar 10,6%, yang melambat dari pertumbuhan 17,7% pada periode yang sama tahun 2022. Kontribusinya terhadap penerimaan pajak sekitar 3,5%.

Dari keempat sektor usaha tersebut, penurunan pertumbuhan penerimaan pajak terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor pertambangan, masing-masing sekitar 95,2%; 92,9%; dan 82,3%. Hal ini sejalan dengan menurunnya harga komoditas serta ekspor-impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor Indonesia selama Januari-September 2023 mengalami kontraksi sebesar 12,34%, sementara impor menyusut sebesar 12,45%.

Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak pada beberapa sektor usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk segera mengatasi. Hal ini mengingat realisasi penerimaan pajak hingga September 2023 baru mencapai 80,78% dari target. Jika tren penurunan tersebut berlanjut hingga akhir tahun, diperkirakan tidak akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2023. Terlebih lagi, pada tahun 2024, pemerintah juga menargetkan sektor-sektor usaha ini sebagai sektor yang potensial bagi penerimaan perpajakan.

Determinan yang mempengaruhi terjadinya tindakan *Tax Avoidance* adalah fenomena yang kompleks, dan salah satunya adalah adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perusahaan. Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dianggap sebagai bagian dari implementasi CSR perusahaan, karena membantu membiayai pembangunan negara. Namun, pemahaman perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pembayaran pajak oleh perusahaan sering dianggap sebagai bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR). Hal ini karena pajak yang dibayarkan berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hoi, Wu, dan Zhang (2013) dalam Jondro, Elisa dan Widuri (2016), pembayaran pajak adalah salah satu cara mendasar bagi perusahaan untuk terlibat dengan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dengan kualitas CSR yang baik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak, karena pajak merupakan bagian dari aktivitas CSR mereka

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), serta Dharma dan Noviari (2017), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat CSR perusahaan, semakin rendah tingkat *Tax Avoidance*. Namun, Hidayat (2020) menemukan bahwa CSR dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena beberapa perusahaan memanfaatkannya sebagai alat untuk menghindari pajak.

Teori mengenai CSR dan *Tax Avoidance* menunjukkan hubungan yang kompleks antara kedua konsep ini. CSR mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etika perusahaan terhadap masyarakat. Namun, terdapat juga fenomena di mana beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Contoh terkait dengan CSR di Indonesia adalah kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2019, di mana ditemukan dugaan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk kegiatan internal, seperti pemilihan umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).

Penelitian di bidang akuntansi telah banyak dilakukan untuk mengkaji hubungan antara CSR dan *Tax Avoidance*, dan hasilnya bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin rendah tingkat *Tax Avoidance*, sementara yang lain menunjukkan hasil yang berbeda.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemisahan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan politik merupakan prinsip dasar untuk menjamin integritas kebijakan publik, termasuk dalam sistem perpajakan. Namun, di Indonesia, hubungan antara elit ekonomi dan elit politik semakin erat dan menciptakan iklim oligarkis yang mempermudah perusahaan-perusahaan besar melakukan praktik *tax avoidance*. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri. Perusahaan ini dipimpin oleh Garibaldi “Boy” Thohir, seorang pengusaha tambang besar sekaligus kakak dari Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Umum PSSI, yang juga merupakan Ketua TKN (Tim Kampanye Nasional) pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Keterlibatan Erick Thohir dalam lingkaran kekuasaan puncak memperkuat dugaan bahwa Adaro memperoleh kedekatan istimewa dengan pemerintah.

Selain itu, Adaro diketahui memiliki relasi dengan sejumlah tokoh politik lainnya, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang berpengaruh dalam kebijakan energi dan pertambangan, serta Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024–2029, yang partainya—Gerindra—memiliki kepentingan strategis dalam proyek-proyek energi nasional. Bahkan, Adaro terhubung secara struktural dengan partai politik besar seperti PDI-P dan Golkar, melalui afiliasi para mantan pejabat dan pengusaha yang duduk di kursi komisaris atau dewan penasihat perusahaan tambang. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *state capture*, yaitu situasi ketika kepentingan korporat menyusup ke dalam lembaga pemerintahan dan memengaruhi pembuatan regulasi, termasuk dalam sistem perpajakan.

Artikel The Jakarta Post berjudul “*Election 2024: Oligarchy’s grip strengthens, citizens’ sufferings increase*” menegaskan bahwa “*corporate interests are no longer outside of politics; they are embedded within it.*” Pernyataan ini menyoroti bagaimana kekuatan politik dan kekuatan modal saling menopang dalam struktur kekuasaan yang tidak lagi transparan dan akuntabel. Dalam kasus ini, koneksi politik menjadi alat untuk memperlemah pengawasan dan mempermudah perusahaan-perusahaan besar dalam melakukan penghindaran pajak secara sistematis.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Faccio (2007) dan Kim dan Zhang (2016), menunjukkan bahwa perusahaan dengan *political connection* cenderung membayar pajak lebih rendah dan memiliki risiko deteksi yang lebih rendah. *Political connection* dianggap bernilai karena dapat memberikan beberapa manfaat, seperti akses kredit yang lebih mudah, perlindungan terhadap aturan, dan preferensi dalam mendapatkan bantuan pemerintah.

Selain *political connection*, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang akan dijelaskan dengan *Good Corporate Governance*. Penerapan *good corporate governance* tentu sangat dibutuhkan bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan *good corporate governance* adalah penopang yang utama pemenuhan kepentingan pemegang saham dan diyakini mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan

yang baik, efisien, dan menguntungkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh menurunkan tindakan *tax avoidance* perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian Bayar dan Sardarli (2017) yaitu perusahaan yang meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* mendapatkan manfaat, salah satunya adalah dapat mengurangi dampak negatif dari manajemen pajak, hal ini menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* akan bisa dicegah dengan adanya penguatan regulasi penerapan *good corporate governance* pada perusahaan disertai dengan kontrol dari pemerintah terhadap aplikasinya pada perusahaan. Sehingga akan mencegah praktek *tax avoidance* dan mendukung upaya maksimalisasi penerimaan pajak bagi negara. Penelitian Desai dan Dharmapala (2006) serta Seidman dan Stomberg (2011) membuktikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan dapat menurunkan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, banyaknya perbedaan proksi yang digunakan untuk mengukur variabel penghindaran pajak, dan juga, masih terdapat kesenjangan penelitian pada variabel *Corporate Social Responsibility*, *political connection*, *Good Corporate Governance*, terutama di Indonesia. Kesenjangan ini penting untuk diisi karena tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga pemerintah tidak dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara optimal.

Penggunaan *ETR* diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan fenomena, kesenjangan penelitian dan manfaat dari pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Political Connection*, *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Political Connection*, dan *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023?
3. Apakah *Political Connection* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023?
4. Apakah *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Political Connection*, dan *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023.
2. Untuk Mengetahui Apakah *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023.
3. Untuk Mengetahui Apakah *Political Connection* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023.
4. Untuk Mengetahui Apakah *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan Pertambangan di Indonesia. Peneliti juga dapat menemukan hubungan antara *corporate social responsibility*, *political connection*, *good corporate governance*, dengan praktik penghindaran pajak, memberikan wawasan baru dalam literatur akademis.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan menganalisis lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Bukti empiris tentang pengaruh *corporate social responsibility*, *political connection*, *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang merupakan informasi relevan bagi investor sebagai tambahan informasi dalam mengambil keputusan investasi.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini memberikan informasi kepada regulator agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pembayaran pajak perusahaan di masa yang akan datang.